

IMPLEMENTASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

OLEH

Abdul Halim/ 1301110678
(abdulhalim2652@gmail.com)

Pembimbing : Dadang Mashur, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstrak

Penelitian dilatarbelakangi oleh Pembangunan Infrastruktur Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir yang belum terealisasi dengan baik sesuai dengan Rencana Kegiatan Program Pengembangan Desa Tanah Merah sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPDes Desa Tanah Merah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Pembangunan Infrastruktur Desa Tanah Merah yang berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 27 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 dan faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 di bidang pembangunan Desa Tanah Merah.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, untuk menjawab tujuan penelitian, penulis menggunakan teori Tachjan (2006: 8). Menurutnya, ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam implementasi yang mutlak diantaranya: Pertama, Unsur Pelaksana, Kedua, Program yang dilakukan, Ketiga, Kelompok Sasaran.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara. Metode penentuan informan penelitian yang digunakan adalah teknik triangulasi. Lokasi penelitian di Desa Tanah Merah dan Kantor Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di dalam bidang pembangunan desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan oleh Desa Tanah Merah yang memiliki gambaran tentang siapa yang menjadi unsur pelaksana dari program kegiatan pembangunan desa dan bagaimana pelaksanaannya. Dalam sistem pelaksanaannya belum direalisasikan secara optimal dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor komunikasi dan faktor keadaan geografis.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, RKP

Abstract

This research is motivated by Infrastructure Development of Tanah Merah Village, Tanah Merah Sub-district, Indragiri Hilir Regency that has not been realized well in accordance with the Tanah Merah Village Development Program Activity Plan as stated in RKPDes Desa Tanah Merah document. The purpose of this research is to find out how is the Implementation of Village Government Work Plan (RKPDes) in the Village Development Sector of Tanah Merah based on Indragiri Hilir Regent Regulation No. 27 of 2016 about Regional Development Plans Indragiri Hilir Regency in 2016 Year and what factors that affect the Implementation of Government Work Plan (RKP) in 2016 Year at the field of development of the village of Tanah Merah.

Based on the formulation above of the research problems, to answer the purpose of research, the authors use the theory Tachjan (2006: 8). According to him, there are three things that must be fulfilled in the absolute implementation of: First, the Implementing Elements, Second, Programs conducted, Third, Target Group.

While the method used in this research is descriptive qualitative, in the form of primary and secondary data. Data collection techniques such as observation and interview. Determination method of research informant used is triangulation technique. Research location in Tanah Merah Village and Tanah Merah Village Office Tanah Merah Sub-district Indragiri Hilir Regency.

The result of the research shows that the Implementation of Village Government Work Plan (RKPDes) in the Village Development Sector of Tanah Merah Tanah Merah Sub-district of Indragiri Hilir Regency conducted by Tanah Merah Village with a description of who becomes the implementing element of the village development program and how it is implemented. In the implementation of the system has not been realized optimally with influencing factors such as communication factors and geographical factors.

Keywords: Implementation of the Policy, RKP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat dipedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa diselenggarakan oleh Pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan sesuai dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk mengkoordinasikan

pembangunan desa, Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan diwilayahnya.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun.
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan peraturan Desa.
- c. Perencanaan pembangunan desa yang baik dilakukan oleh masyarakat desa sendiri, karena masyarakat yang tahu apa masalah yang dihadapinya, apa potensi yang ada di wilayahnya dan mereka yang tahu apa yang harus dilakukannya. Paling tidak perencanaan pembangunan desa termuat dalam dokumen yang disusun secara partisipatif dalam Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa atas sering disebut

dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) menyatakan bahwa pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan kebutuhan pembangunan Desa tersebut harus dihasilkan dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Jika pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa berikutnya.

Daftar usulan RKP Desa yaitu penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang akan diusulkan pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Tanah Merah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang memiliki jumlah

penduduk sebanyak 35, 679 jiwa pada tahun 2015. Kecamatan Tanah Merah memiliki 10 desa dan kelurahan, diantaranya Kuala Enok, Selat Nama, Sungai Laut, Sungai Nyiur, Tanah Merah, Tanjung Baru, Tanjung Pasir, Tekulai Bugis, Tekulai Hilir, dan Tekulai Hulu.

Penduduk yang tinggal dikecamatan Tanah Merah sering disebut orang pesisir karena letak kecamatan Tanah Merah terletak di pinggir hilir pesisir sungai Indragiri mengakibatkan desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Tanah Merah sering terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir. Rusaknya infrastruktur jalan tersebut dikarenakan longsor dan banjir terutama di desa Tanah Merah yang sangat rawan dengan dengan bencana alam tersebut. Berikut adalah Data kebencanaan alam yang terjadi di Desa Tanah merah pada Tahun 2016/2017.

Tabel 1.1 Data Bencana Alam (Longsor dan Banjir) di Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2017

No	Lokasi Kejadian Bencana	Waktu	Jumlah Kerusakan
1	Banjir di jalan Kuraga (Depan Mesjid raya desa Tanah Merah)	Septermber 2016	8 rumah dan sepanjang 50 meter jalan yang terendam air
2	Banjir di jalan perintis Utama (Depan SMAN1 Tanah Merah)	November 2016	Sepanjang 100 meter jalan terendam air
3	Banjir di jembatan penghubung antara desa Tanah Merah dan Kelurahan Kuala Enok (Jembatan Baru/JB)	Desember 2016	Sepanjang 40 meter jembatan terendam air
4	Longsor di Gg. Seni RT 02 RW 01 Desa Tanah Merah	Desember 2016	6 rumah dan 1 lorong di Gang Seni turun ketanah
5	Longsor di jembatan penghubung desa Tanah Merah dan Kelurahan Kuala Enok	Februari 2017	1 jembatan ambruk ketanah serta 4 rumah, 3 ruko hanyut terseret arus sungai perigi
6	Longsor di jalan Melati Gg. Seni RT 02 RW 01 Desa Tanah Merah	April 2017	12 rumah dan 1 jalan ambruk terseret arus sungai

Sumber: Kepala Desa Tanah Merah

(website: tanahmerah.desa.id)

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan tentang bencana alam di Desa Tanah Merah pada tahun 2016-2017. Pada bulan september 2016 terjadi banjir di jalan kuraga yang jumlah kerusakannya yaitu sepanjang 50 meter dan 8 rumah tergenang air. Pada bulan November terjadi banjir di jalan perintis utama tepatnya di depan SMAN 1 Tanah Merah terendam air sepanjang 100 meter. Pada bulan berikutnya dibulan Desember banjir yang terjadi tepatnya dijembatan penghubung antara Desa Tanah Merah dan Kelurahan Kuala Enok (Jembatan Baru/JB) terendam air sepanjang 40 meter. Kemudian terjadi longsor pada bulan bulan yang sama tepatnya di Gg.Seni RT 02 RW 01 Desa Tanah Merah yang mengakibatkan 6 rumah dan 1 lorong di Gg. Seni ambruk terkena longsor. Dan bencana alam selanjutnya pada bulan Februari tahun 2017 terjadi longsor dasyat di jembatan penghubung antara Desa Tanah Merah dan Kelurahan Kuala Enok yang mengakibatkan 1

jembatan ambruk, 4 rumah, dan 3 ruko hanyut terbawa aliran arus sungai. Kemudian yang terakhir kembali terjadi longsor pada bulan April 2017 tepatnya dijalan Melati Gg. Seni RT 02 RW 01 yang mengakibatkan 12 rumah serta 1 jalan ambruk terseret arus sungai.

Sedangkan dalam proses penyusunan RKP Desa untuk bidang pembangunan Desa Tanah Merah yang telah direncanakan melalui tahapan-tahapan penyusunan RKP Desa terdapat beberapa fenomena yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan proses penyusunan RKP dan masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut dalam musyawarah pembangunan Desa serta menjalankan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan yang direncanakan khususnya dalam bidang pembangunan di Desa Tanah Merah.

Dari fenomena-fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa fenomena yang terjadi dalam Penyusunan RKP di Desa Tanah Merah antara lain sebagai berikut:

1. seringnya terjadi bencana alam di Desa Tanah Merah seperti longsor dan banjir membuat pembangunan (Fasilitas Desa) seperti jembatan atau jerambah beton, jalan serta banyaknya rumah warga yang hancur akibat bencana alam tersebut. Hal ini mengakibatkan pembangunan di Desa Tanah Merah sedikit terhambat, karena banyaknya jalan dan jembatan yang rusak akibat longsor dan banjir. Jadi, RKP Desa yang sudah dibuat oleh pemerintah Desa Tanah Merah tidak terealisasi dengan maksimal.
2. Banyaknya program kegiatan RKP Desa Tanah Merah khususnya dalam bidang Pembangunan Desa belum terealisasi. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Desa untuk ikut dalam kegiatan pembangunan.
3. Pembangunan yang direncanakan dan yang sudah terealisasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, volume jalan yang tidak sesuai seperti yang telah direncanakan.
4. Terbatasnya dana anggaran Desa dalam memenuhi berbagai jenis kegiatan khususnya bidang Pembangunan Desa yang tersusun di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tanah Merah.

Untuk itu berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi rencana kerja pemerintah dalam bidang pembangunan Desa Tanah Merah kecamatan Tanah Merah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dalam bidang pembangunan desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dalam bidang pembangunan desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana proses penyusunan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dalam bidang pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKPDes) Tahun 2016 dalam bidang pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran peneliti kepada pihak lain yang akan meneliti dengan permasalahan

yang sama terutama di program studi ilmu administrasi negara.

2. Hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan ilmu administrasi negara dan memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang ilmu administrasi negara khususnya tentang Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam bidang pembangunan desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Manfaat Praktis**
1. Bagi Pemerintah
Sebagai bahan informasi Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pembangunan Desa.
 2. Bagi Masyarakat
Sebagai bahan informasi untuk mengetahui rencana pembangunan Desa.
 3. Bagi Peneliti
Sebagai wahana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat pada mata kuliah di jurusan Ilmu Administrasi Publik.

KONSEP TEORI

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut **Tachjan (2006:8)** dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan Publik* menjelaskan tentang unsur-unsur dari Implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

- a. Unsur pelaksana.
- b. Adanya program yang dilaksanakan.
- c.. *Target group* atau kelompok sasaran.

a. Unsur Pelaksana

Pihak pertama yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif birokratik pada setiap pemerintahan. **Smith** dalam **quade** dalam **Tachjan (2006:27)** menyebutnya dengan istilah *implementing organization*, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Unit-unit birokratik ini dominan dalam implementasi program dan kebijakan. Unit birokrasi ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebijakn publik dilakukan. Dalam implementasi kebijakan ia memiliki direksi mengenai instrumen apa yang palingtepat untuk digunakan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimilikinya ia melakukan berbagai tindakan mulai dari: “penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, pergerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan dan pengendalian”.

b. Program yang dilaksanakan

Kebijakan yang bersifat administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi dalam program-program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program **Tachjan (2006:31)**.

Siagian dalam **Tachjan (2006:32-33)** menyebutkan bahwa program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sasaran yang hendak dicapai

- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu.
- c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya.
- d. Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, dan
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Selanjutnya, **Grindle** dalam **Tachjan (2006:33)** mengemukakan bahwa isi program tersebut harus menggambarkan:

- a. Kepentingan yang terpengaruh oleh program (*Interest affected*)
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan (*Type of benefits*)
- c. Derajat perubahan yang diinginkan (*Extent of change envisioned*)
- d. Status pembuat keputusan (*Side of decision making*)
- e. siapa pelaksana program (*Program implementing*)
- f. Sumber daya yang digunakan (*Resources committed*)

Menurut **Tachjan (2006:35)** tahap implementasi program akan mencakup urutan-urutan langkah sebagai berikut:

1. Merancang bangunan, program, beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.
2. Melaksanakan program yang mendayagunakan struktur-struktur personalia, dana dan sumber-sumber lainnya, prosedur-prosedur, dan metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi pelaksanaan kebijakan.

c. Kelompok Sasaran (*Target Group*)

Tachjan (2006:36) mengartikan *target group* sebagai kelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

Adapun sampai seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan tergantung kepada kesesuaian isi kebijakan dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh mereka seperti besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, pengalaman dan keadaan sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. Adapun karakteristik tersebut oleh lingkungan dimana mereka tinggal baik dilingkungan geografis maupun dilingkungan sosial budaya.

Sejalan dengan hal diatas, faktor komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik.

Rue dan Byars dalam **Pasalong (2011:175)** mendefinisikan kinerja sebagai tingkat pencapaian hasil. Jika dikaitkan dengan kebijakan, kinerja suatu kebijakan menurut **Purwanto (2012:100)** dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian implementasi dalam mewujudkan sasaran dan suatu tujuan kebijakan, baik berupa keluaran kebijakan maupun hasil kebijakan.

Menurut **Purwanto (2012:102)** untuk dapat menentukan tinggi rendahnya kinerja mplementasi suatu kebijakn maka penilaian terhadap kinerja merupakan sesuatu yan penting. Penilaian terhadap kinerja adalah penerapan metode yang dipakai oleh peneliti untuk dapat menjawab

pertanyaan pokok dalam implementasi, yaitu; apa isi dan tujuan dari suatu kebijakan, apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tersebut dan apakah setelah tahapan-tahapan tersebut dilakukan, implementasi yang dijalankan tadi mampu mewujudkan tujuan kebijakan atau tidak.

Purwanto (2012:102-111) dalam bukunya implementasi kebijakan publik mengatakan, untuk dapat membuat justifikasi apakah suatu implementasi gagal atau berhasil maka seorang peneliti melakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Alat bantu yang dapat dipakai oleh seorang peneliti untuk melakukan penelitian adalah terdapat dalam dua indikator:

1. *Policy output*, merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi, dan lain-lain yang diimplementasikan suatu kebijakan.

Indikator yang dapat digunakan untuk dapat menilai kualitas *policy output* adalah sebagai berikut:

- a. Akses.
 - b. Cakupan.
 - c. Frekuensi.
 - d. Bias.
 - e. Ketepatan Layanan.
 - f. Akuntabilitas dan Kesesuaian program dengan kebutuhan.
2. *Policy outcomes* merupakan indikator untuk menilai hasil implementasi suatu kebijakan. Dalam berbagai literatur. Indikator *outcomes* juga disebut sebagai indikator dampak kebijakan

Hasil atau dampak kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu dari kondisi awal yang tidak dikehendaki menuju kondisi yang dikehendaki.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier dalam **Wahab (2012:135)** menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Nugroho dan Horn Sujianto (2008:34-37) menetapkan ada enam variable yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

1. Standard An Tujuan Kebijakan.
2. Sumberdaya Kebijakan.
3. Aktivitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional.
4. Karakteristik Pelaksanaan.
5. Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Politik.
6. Disposisi Atau Sikap Pelaksana

George dalam Nogi (2003:2) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantaranya pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

2. Konsep Perencanaan

A. Pengertian Perencanaan

Menurut **Siagian (2012:36)** perencanaan adalah usaha sadar dan mengambil keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa

depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan **Richard L. Daft (2010:7)** mengatakan perencanaan adalah mengidentifikasi beberapa berbagai tujuan untuk kinerja organisasi dimasa datang serta memutuskan tugas dan pengguna sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya.

Selanjutnya **Billy E. Goetz** dalam **Hasibuan (2011:92)** perencanaan merupakan pemilihan yang fundamental dan masalah perencanaan yang timbul, jika terdapat alternatif-altrnatif. Selain itu **A.M Williams** dalam **Affuddin (2010:95)** maka proses dari perencanaan meliputi:

1. Menentukan atau menetapkan dengan jelas maksud dan tujuannya.
2. Menentukan alternatif.
3. Mengatur sumber-sumber yang diperlukan.
4. Menentukan organisasi, metode dan prosedur.
5. Menentukan atau menetapkan rencana itu sendiri.

Erly Suandy (2001:2) secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Hamzah B. Uno (2008: 2) juga menyatakan perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa

perencanaan mengandung paling sedikit 4 unsur yaitu:

- a. Ada tujuan yang harus dicapai
- b. Ada strategi untuk mencapai tujuan
- c. Sumber daya yang mendukung
- d. Implementasi setiap keputusan.

George R. Terry dan Leslie W. Rue (2009:9) menyatakan bahwa planning atau perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Definisi perencanaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek yaitu:

1. Penentuan tujuan yang akan dicapai. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.
2. Usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternative yang dipilih.

Suatu perencanaan yang lengkap dan baik akan memiliki unsur-unsur yang lengkap, paling tidak terdapat lima unsur perencanaan. Menurut **Darwis (2009:60-61)** unsur-unsur perencanaan diantaranya:

- a. Unsur tujuan (*Purpose*), yaitu perumusan yang lebih jelas dan terperinci mengenai tujuan yang telah di tentukan untuk dicapai.
- b. Unsur kebijakan (*Polish*), yaitu merupakan metode atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan.
- c. Unsur prosedur (*Procedure*), yaitu meliputi pembagian tugas

serta hubungannya, baik vertikal maupun horizontal.

- d. Unsur kemajuan (*Progressing*), yaitu penentuan standar atau ukuran mengenai segala sesuatu yang hendak dicapai. Dalam hal ini ada hubungannya dengan *how many*, *how will*, dan *how long*, dan sebagainya.
- e. Unsur program (*Programming*), yaitu tidak hanya menampilkan perencanaan secara keseluruhannya tetapi menyusunnya menurut urutan-urutan tertentu berdasarkan tingkat kepentingannya, macam-macam proyek atau rencana kerja untuk direalisasikan.

Perencanaan yang efektif adalah proses pemikiran yang matang dan bermuara kepada keputusan berdasar fakta dan bukan kepada emosi atau keinginan belaka. Perencanaan merupakan proses yang berlanjut karena disamping ditujukan ke masa depan, juga harus merupakan perwujudan dari kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan dan pengalaman di masa lalu dengan kenyataan yang dihadapi sekarang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah Deskriptif dengan pendekatan penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan memahami fenomena-fenomena yang ada dilapangan yang dialami oleh subjek peneliti misalnya kondisi masyarakat, kondisi pembangunan, perilaku, tindakan, motivasi dan lain-lain dengan cara Deskriptif dalam bentuk bahasa dan kata-kata, pada suatu konteks yang alamiah. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah

Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Sesuai dengan judul yang dibuat oleh peneliti, peneliti memilih lokasi tersebut karena terlihat jelas dari fenomena yang ada bahwa di desa Tanah Merah masih terdapat banyak pembangunan desa yang belum direnovasi sehingga masyarakat mendapatkan kesulitan untuk melakukan aktifitasnya di desa tersebut. Adapun fasilitas pembangunan desa yang belum terealisasi dengan sempurna seperti: jalan raya, jerambah beton atau jembatan dan lain-lain.

Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul tentang Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Informan Penelitian

Informan peneliti adalah orang atau pihak yang mengetahui keadaan desa tersebut dan memberikan informasi mengenai objek penelitian tersebut. Prosedur pengambilan informan pada awalnya dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sample dengan mempertimbangkan hal tertentu. Informan selanjutnya dengan teknik snowball sampling, yaitu mengambil satu orang untuk diwawancara selanjutnya bergulir kepada informan lain secara berantai hingga diperoleh sejumlah informan yang diperlukan

Pada saat ini penulis menggunakan key informan yaitu Kepala Desa Tanah Merah, Sekretaris Desa Tanah Merah, Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Tanah Merah,

Kaur Perencanaan Desa Tanah Merah, Ketua RW/RT Desa Tanah Merah dan Masyarakat Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten

Indragiri Hilir. Berikut data Informan Penelitian yang dimuat pada Tabel 1.4 dibawah ini:

Tabel 1.4 Informan Penelitian

No	INFORMAN	JUMLAH INFORMAN
1	Kepala Desa Tanah Merah	1 orang
2	Sekretaris Desa Tanah Merah	1 orang
3	Kasi Pembangunan Tanah Merah	1 orang
4	Kaur Perencanaan Desa Tanah Merah	1 orang
5	Ketua RW/RT Desa Tanah Merah	2 orang
6	Masyarakat Desa Tanah Merah	3 orang
7	Ketua BPD Desa Tanah Merah	1 orang
8	Ketua LPM Desa Tanah Merah	1 orang
9	Pemuka Masyarakat Desa Tanah Merah	1 orang
10	Perwakilan dari Ibu PKK Desa Tanah Merah	1 orang
	JUMLAH	13 orang

3. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian **Sugiono (2011:137)**. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara, serta pengamatan merupakan hasil

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi sehubungan dengan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui sumber

kedua atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku, atau data yang telah diolah, seperti data yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk surat kabar, majalah, maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. **Sugiono (2011:137).**

Data yang penulis peroleh saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanah Merah.
- b. Data bencana alam di desa Tanah Merah.
- c. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung ditempat penelitian untuk mengetahui objek yang akan diteliti. Guna untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Wawancara

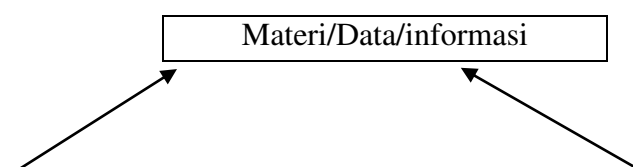
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan mengajukan pertanyaan kepada informan yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

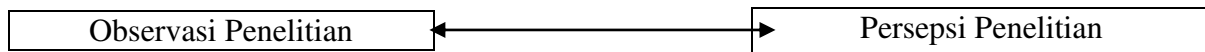
c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data ini diperlukan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data, penulis mengambil teknik triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan check, re-check dan crosscheck antara data dengan observasi penelitian dilapangan, yang selanjutnya hasil observasi ini dilakukan crosscheck melalui persepsi penelitian. Teknik triangulasi secara umum dapat digambarkan pada gambar berikut :





Sumber: Sugiono 2007

Gambar 1.2 Teknik Triangulasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpdes) Dalam Bidang Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah suatu kerangka dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan lima tahunan yang dimulai dari Januari 2015 sampai dengan Desember 2020. RPJM-Desa adalah perencanaan tingkat menengah desa yang harus disosialisasikan dan dipahami oleh semua komponen baik masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa sebagai dokumen untuk melaksanakan pembangunan dan pedoman.

Dokumen RPJM-Desa adalah Rencana Pembangunan Desa Tanah Merah yang pelaksanaan operasionalnya dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa). RKP-Desa secara teknis adalah pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama 1(satu) tahun. Pelaksanaan dan keberhasilan RPJM-Desa adalah tanggung jawab dari pemerintah desa Tanah Merah khususnya kepada Tim Penyusunan RKP (Tim 11) untuk menentukan terwujudnya Rencana Kerja pemerintah tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada implementasi Rencana Kerja pemerintah (RKPDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah

Merah. Adapun pembangunan yang dimaksud merupakan pelaksanaan program kegiatan yang disusun oleh panitia Tm 11 dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa yang berkaitan dengan perubahan pembangunan desa ke arah yang lebih baik lagi.

Berikut ini akan penulis paparkan bagaimana tahap-tahap kegiatan dalam Implementasi RKPDes dalam Bidang Pembangunan berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016:

1. Unsur Pelaksana

Dalam melaksanakan penyusunan RKPDes tentu memiliki unsur pokok rencana tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang lebih operasional, maka unsur pokok yang terkandung didalamnya juga berbeda dengan yang lazim yang terdapat dalam RPJM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian bahwa maksud dari unsur pelaksana adalah sebagai berikut:

“Adapun yang membuat unsur pokok rencana tahunan desa Tanah Merah adalah Tim 11 yang terdiri dari ketua, sekretaris serta anggota-anggota tim 11 yang mana anggota-anggota tersebut diambil dari beberapa perangkat desa seperti: anggota BPD 2 orang, Ketua LPM 1 orang, Perangkat Desa 3 orang, Kader Pemeberdayaan

Masyarakat 2 orang dan Unsur Masyarakat 3 orang yang mana mereka semua lah yang menyusun RKP sampai dengan selesai". (Wawancara dengan Sekretaris Desa Tanah Merah selaku Ketua Tim 11, 06 Juli 2017).

Berdasarkan dari wawancara tersebut, menerangkan bahwa dalam kegiatan penyusunan RKPDes memiliki unsur pokok dalam melaksanakannya. Adapaun unsur pokok tersebut adalah terdiri dari sebelas orang yang tergabung dalam Tim 11 yang beranggotakan Sekretaris Desa sebagai Ketua, dan beberapa dari staff pemerintahan desa Tanah Merah.

Dalam upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode dipengaruhi pada upaya untuk mewujudkan kebijaksanaan yang dalam hal ini Rencana Kerja Pembangunan Desa menjadi hasil yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Pembangunan Desa Tanah Merah.

2. Program yang dilaksanakan

Penelitian ini hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan dalam bidang pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil wawancara dengan informan penelitian :

"Adapun program kegiatan pembangunan Desa Tanah Merah yang diusulkan adalah sebanyak 25 program kegiatan yang diusulkan, akan tetapi hanya 11 kegiatan yang sudah terealisasi. Karena dari ke 11 program kegiatan yang sudah terealisasi tersebut sangat penting untuk didahulukan

pembangunannya hal ini disebabkan oleh parahnya rusak infrastruktur bangunan di Desa Tanah Merah seperti jembatan-jembatan, jerambah,serta beberapa tempat umum seperti pembangunan rumah sakit, pos kamling dan renovasi Kantor Desa Tanah Merah". (Wawancara dengan Kepala Desa Tanah Merah, 03 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Pemerintah desa Tanah Merah telah mengusulkan rencana pembangunan desa sebanyak 25 program kegiatan pembangunan desa, akan tetapi hanya 11 kegiatan pembangunan desa sudah terealisasi. Hal ini disebabkan karena banyaknya infrastruktur desa yang rusak parah.

Dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan desa, harus memiliki tahap persiapan terlebih dahulu sebagai langkah awal yang harus dilakukan ialah sosialisasi penyusunan RKPDes Desa Tanah Merah. dalam bidang pembangunan desa.

3. Kelompok Sasaran (Target Group)

Pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa harus memerlukan *target group* (kelompok sasaran) yang menjadi landasan utama demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) khususnya dalam bidang pembangunan desa Tanah Merah, ada beberapa tujuan atau target yang ingin dicapai menurut informan yang telah di wawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

"Adapun target yang akan dicapai dalam dokumen RKPDes desa Tanah Merah dalam bidang pembangunan

desa antara lain: pembangunan jembatan-jembatan, pembangunan jerambah beton dan pembangunan jalan desa Tanah Merah. Dalam dokumen RKPDes Desa Tanah Merah, ada 25 usulan program kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh Tim Penyusun RKPDes, akan tetapi, hanya 11 program kegiatan yang terealisasi dan mencapai target yang sudah direncanakan sebelumnya yang tercantum dalam dokumen RKPDes Desa Tanah Merah Tahun 2016". (Wawancara dengan Kasi Pembangunan Desa Tanah Merah, 12 Juli 2017).

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara tersebut yang menyatakan bahwa dari 25 jenis kegiatan pembangunan yang diusulkan dalam dokumen RKPDes desa Tanah Merah, hanya 11 kegiatan pembangunan desa yang terealisasi pada tahun 2016. Antara lain pembangunan jerambah beton dan pembangunan jalan. Seharusnya ke 25 program kegiatan pembangunan desa tersebut dapat terealisasi dengan sempurna agar pembangunan di desa Tanah Merah berjalan dengan lancar yang akhirnya mengakibatkan desa Tanah Merah menjadi desa yang baik pembangunannya.

Selanjutnya ditambahkan lagi oleh informan berikutnya yaitu ia mengatakan bahwa:

"Lambatnya pembangunan Desa Tanah Merah selain disebabkan oleh tidak sesuainya anggaran yang tersedia dengan usulan program kegiatan pembangunan yang diusulkan

adalah seringnya terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir. Hal ini yang mengakibatkan lambatnya proses pembangunan di Desa Tanah Merah". (Wawancara dengan Ketua RT 003 Desa Tanah Merah, 9 Juli 2017).

Dari hasil wawancara tersebut yang mengungkapkan bahwa penyebab ketidakterealisasinya secara keseluruhan pembangunan desa Tanah Merah yang diusulkan karena anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan usulan program yang tercantum dalam dokumen RKPDes desa Tanah Merah. Seharusnya pemerintah desa Tanah Merah beserta Tim 11 dapat menyesuaikan anggaran dana yang disediakan dengan usulan program yang akan dibuat kedalam dokumen RKPDes desa Tanah Merah agar terjadi keseimbangan antara anggaran dengan kegiatan pembangunan desa yang diusulkan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini didapat berdasarkan observasi langsung di lapangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan informasi. Hal ini berkenaan dengan bagaimana tujuan kebijakan

disosialisasikan kepada organisasi atau publik (masyarakat) dan manfaat dari kebijakan itu. Adapun bentuk komunikasi yang digunakan dalam implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 adalah komunikasi verbal. Secara sederhana komunikasi verbal berarti komunikasi yang disampaikan secara lisan dan tulisan atau gambar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, adapun salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi RKPDDes tanah Merah antara lain sebagai berikut:

“Komunikasi. komunikasi ini dilakukan dengan tatap muka antara Kepala Desa Tanah Merah dengan para masyarakat, juga dengan unsur pelaksana yang terkait yaitu Tim Penyusun RKP (Tim Sebelas). Komunikasi antar pihak pelaksana terkait dengan sosialisasi tentang usulan rencana program kegiatan pembangunan Desa Tanah Merah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan pencapaian tujuan. Kebersamaan dan partisipasi masyarakat sehingga komunikasi antara pihak pelaksana berjalan dengan baik”. (Wawancara dengan Sekretaris Desa Tanah Merah, 04 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pentingnya komunikasi dalam bersosialisasi. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris desa Tanah Merah yang mengatakan bahwa perlunya

komunikasi tatap muka antara Kepala desa tanah Merah dengan para masyarakatnya. Begitu juga dengan unsur pelaksana RKPDDes yang tergabung dalam Tim 11 harus menjaga komunikasi yang baik dengan Kepala Desa dan masyarakat terkait dengan usulan rencana program kegiatan pembangunan desa Tanah Merah. Namun seharusnya ini yang menjadi salah satu prioritas utama tetapi fakta dilapangan yang terjadi berdasarkan hasil observasi secara langsung bahwa secara keseluruhan informasi terkait dalam pembangunan Desa masih belum merata.

Ditambahkan lagi oleh informan penelitian selanjutnya yang mengungkapkan bahwa:

“Pemerintah seharusnya lebih tanggap dalam menanggapi keluhan dari masyarakat, Desa Tanah Merah dalam pelaksanaan pembangunan Desa masih banyak yang harus dibangun. Banyaknya masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam sosialisasi pembangunan Desa. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya peran pejabat Desa Tanah Merah serta kecamatan dalam mengayomi masyarakatnya. Seharusnya dengan adanya sosialisasi pembangunan Desa harus diikuti sertakan dalam mengusulkannya agar jelas program tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat pun tersampaikan”. (Wawancara dengan Masyarakat RT 002 Tanah Merah, 07 Juli 2017).

Dari hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa masyarakat belum mengetahui secara jelas akan program ini, tentunya akan sulit untuk diupayakan dalam pencapaian tujuan

dikarenakan masyarakat masih ada yang belum menyadari pentingnya sosialisai dalam bermasyarakat.

2. Keadaan Geografis

Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah yang ada dipermukaan bumi. Desa Tanah Merah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau yang secara geografis terletak di 103O 15' 57,6" BT dan terletak di 0O 30' 27,36" LS. Secara topografi Desa Tanah Merah termasuk dalam kategori daerah dataran rendah ± 5 s/d 17 meter dari permukaan laut (mdpl). Desa Tanah Merah memiliki jumlah penduduk sebanyak 35, 679 juta jiwa pada tahun 2015. Kecamatan Tanah Merah memiliki 10 desa dan kelurahan, diantaranya Kuala Enok, Selat Nama, Sungai Laut, Sungai Nyiur, Tanah Merah, Tanjung Baru, Tanjung Pasir, Tekulai Bugis, Tekulai Hilir, dan Tekulai Hulu. Penduduk yang tinggal dikecamatan Tanah Merah sering disebut orang pesisir karena letak kecamatan Tanah Merah terletak di pinggir hilir pesisir sungai Indragiri mengakibatkan desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Tanah Merah sering terjadi longsor dan banjir.

Hal ini diperjelas berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai berikut:

“Rusaknya infrastruktur jalan didesa Tanah Merah diakibatkan karena sering terjadinya longsor dan banjir terutama di desa Tanah Merah yang sangat rawan dengan longsor dan banjir selain itu, desa tanah Merah memiliki tekstur tanah yang berawa. Dengan tekstur tanah yang berawa ini sehingga sulit dilaksanakan pembangunan yang dapat

bertahan lama dan proses pengerjaan yang terbilang sulit untuk dilaksanakan. Faktor-faktor alam lah yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan pembangunan seperti hujan, longsor dan banjir serta pasang surut air laut”. (Wawancara dengan Kaur Perencanaan Pembangunan Desa Tanah Merah pada 03 Juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut yang mengungkapkan bahwa adapun faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pembangunan infrastruktur didesa Tanah Merah adalah karena sering terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Hali ini disebabkan karena letak wilayah desa Tanah Merah berada dipinggiran pesisir pantai sehingga setiap kali terjadi hujan., mengakibatkan longsor dan banjir terjadi melanda desa Tanah Merah.

Ditambah lagi oleh informan yang di wawancarai oleh peneliti bahwa:

“Berikut ini adalah hal-hal menyebabkan sering terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor di desa kami tercinta ini adalah alah satunya diakibatkan karena masyarakatnya kurang menjaganya kelestarian alam desa sehingga pencemaran lingkungan seperti sering terjadinya longsor dan banjir di pinggir pantai pesisir, karena seringnya terjadi longsor di desa Tanah Merah, mengakbitkan fasilitas masyarakat Desa tanah Merah

menjadi rusak, diantaranya: jembatan atau sering disebut warga desa dengan jerambah, jalan-jalan, serta rumah warga yang ambruk ke tanah diakibatkan karena longsor tersebut". (Wawancara dengan Ketua masyarakat Desa Tanah Merah pada 08 Juli 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keadaan geografis Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dapat mempengaruhi perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Faktor alam sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, apalagi ditambah dengan kondisi alam serta letak Desa Tanah Merah dipesisir pantai sehingga tekstur tanahnya yang berawa secara otomatis pelaksanaan pembangunan Desa harus direalisasikan semaksimal mungkin agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini, yaitu :

1. Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016, berdasarkan indikator perencanaan yang telah di sepakati sebelumnya oleh aparatur Desa dan

beberapa tokoh masyarakat yang terut serta dalam perencanaan, penyusunan serta pelaksanaan RKPDDes Desa Tanah Merah dalam Pembangunan Desa Tanah Merah belum tercapai tujuannya secara keseluruhan sebagaimana yang diinginkan. Hal ini dikarenakan keterbatasan Dana Anggaran untuk Pembangunan Desa terutama da;lam pembangunan akses jalan sepeeti pembangunan jerambah beton dan pembangunan jalan aspal. Selain itu, masih minimnya partisipasi serta rasa kepedulian masyarakat untuk ikut serta dalam membangun dan menjaga sarana dan prasarana desa agar menjadi desa yang lebih maju. Pembangunan infrastruktur yang masih minim karena berbagai faktor yang mempengaruhi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan observasi dan wawancara langsung terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi ialah faktor komunikasi yang berupa penyampaian informasi kepada masyarakat baik secara lisan,tulisan maupun gambar serta faktor biaya yang terbatas sehingga pembangunan Desa Tanah Merah tidak terlaksana dengan optimal, juga keadaan geografis seperti keadaan iklim tropis dan tekstur tanah yang berawa sehingga menghambat pembangunan infrastruktur di

Desa Tanah Merah selain faktor pasang surut serta curah hujan yang membuat proses pembangunan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan.

merencanakan dan melaksanakan pembangunan faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut dapat segera teratasi sesuai keinginan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, memberikan saran agar Desa Tanah Merah menjadi Desa yang lebih baik lagi adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Agar perencanaan program kegiatan tahunan dalam bidang pembangunan desa Tanah Merah lebih ditingkatkan lagi dalam hal membangun desa dan bersosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa guna untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian alam serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun Desa yang maju dalam segi akses jalan. Program yang dilaksanakan dapat segera terlaksana sesuai dengan ketentuan dan tujuan sehingga pembangunan yang merata dapat diwujudkan.
2. Agar pemerintah desa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan dan bertindak tegas menangani faktor-faktor yang menjadi penghambat proses pembangunan infrastruktur dan keadaan geografis di Desa Tanah Merah. Sehingga dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffuddin. 2010. *Pengantar administrasi pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Darwis dkk. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Pekanbaru: UNRI.
- Hasibuan, Melayu. 2011. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nogi, Hassel. 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Balairung
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus. Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Siagian, Sondang. 2012. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. Lemlit UNPAD.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Jakarta: Lukman Offset.

Yusma, Padhika. 2013. *Implementasi Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2004-2008*. Pekanbaru: UNRI.

Internet:

www.pemdes.tanahmerah.co.id

www.tanahmerah.desa.id

www.lensakualaterapung.co.id

Dokumen:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7).

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016.